

IMPLIKASI BANTUAN IMF DAN WORLD BANK TERHADAP KEMISKINAN STRUKTURAL DI SOMALIA

Oleh: Agatalika Dewa Nuansa J.P

Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta

Email: agathalikadewa.nuansa.2012@fisipol.umy.ac.id

Abstract:

This Journal will explained about IMF and World Bank program has led the Somali economy into a vicious circle, reduced livestock encourage nomadic herders become starved to death, which in turn impact on grain producers are difficult to sell, so the only choice is sold or bartered their grain to feed livestock. Traditional social structure and economy destroyed. The fall of foreign exchange earnings from declining cattle exports and remittances (from Somali workers in the gulf states) impact on the balance of payments and the state of public finances that lead to damage to the economic and social programs of the government. Which in turn, the Structural Adjustment Program destroy somalia and pushing somalia to a failed state.

Keyword: Structural Adjustment Program, International Monetary Fund, World Bank,

PENDAHULUAN

Pemerintahan Somalia sudah tidak efektif sejak awal tahun tahun 1880an sampai pertengahan 2004, struktur sosial seluruh perekonomian tradisional yang berbasis pada pertanian pedesaan serta peternakan nomaden perlahan ‘dihancurkan’ dan diganti dengan adanya daging sapi bebas bea serta produk susu dari Uni Eropa. Hal ini menyebabkan penggembala nomaden menjadi kelaparan. Program IMF dan Bank Dunia yang telah menyebabkan ekonomi masyarakat Somalia masuk ke dalam lingkaran setan.

Implikasi Ekonomi Pinjaman IMF dan World Bank

Meningkatnya Kemiskinan

Awal IMF dan World Bank memasuki Somalia dimulai saat era kepemimpinan Rezim Siad Barre dimana, keadaan ekonomi yang kurang baik pasca perang, dikarenakan kehilangan dukungan dari Uni Soviet dan pengalihan dana perekonomian

untuk dana belanja militer yang ditujukan untuk mengembalikan kekuatan pertahanan yang berimbas pada kelumpuhan perekonomian. Hal ini mengakibatkan hutang luar negeri melonjak tajam melebihi pendapatan dari sektor ekspor, kemudian pengelolaan ekonomi negara yang kurang baik, menimbulkan gejolak ekonomi dalam negara tersebut.

Hal ini mendorong Rezim Barre pada saat itu mengambil keputusan untuk bekerjasama dengan Amerika Serikat kemudian mengajukan pinjaman kepada IMF serta menandatangani perjanjian penyesuaian struktural atau SAP pada awal 1980-an dimana beberapa isi dari SAP tersebut isinya termasuk penghapusan beberapa monopoli pemerintah dan peningkatan investasi publik (Poverties). Dimana ini merusak system sosialis yang dibangun Barre dimana ia telah menasionalisasi industri - industri besar, peternakan, bank, perusahaan asuransi, industri pengolahan minyak dan sebagainya, yang mau tidak mau sebagai konsekuensi dari SAP maka program nasionalisasi yang telah dilakukan Barre menjadi percuma.

Awal tahun 1980-an menjadi titik balik utama kehancuran Somalia, dimana kelaparan dan kemiskinan banyak terjadi di plosok negara sebagai hasil dari konsekuensi Program Penyesuaian Struktural atau SAP atau yang sering disebut *Obat Ekonomi*. Obat Ekonomi menjadi dasar transisi negara yang menjadi akar dislokasi ekonomi dan kekacauan sosial. Dengan berbagai macam program langkah – langkah penghematan yang menyengsarakan masyarakat yang pada dasarnya sudah kekurangan (Cosshudovsky, 2011).

Somalia adalah negara yang pada dasarnya memiliki jenis perekonomian pastoral atau tradisional yaitu berdasarkan "pertukaran" antara para gembala nomaden dan petani kecil. Penggembala nomaden menyumbang 50 persen dari populasi. Pada 1970-an, program pemukiman kembali menyebabkan perkembangan dari sektor yang cukup besar dari pastoralism komersial. Ternak berkontribusi 80 persen dari pendapatan ekspor sampai tahun 1983. Meskipun kekeringan berulang, Somalia tetap hampir swasembada pangan sampai tahun 1970-an (Cosshudovsky, 2011).

Kemudian intervensi IMF dan World Bank pada awal tahun 1980 berkontribusi memperburuk krisis pertanian Somalia. Reformasi ekonomi menggerogoti hubungan tradisional antara "ekonomi nomaden" dan "ekonomi menetap" - yaitu antara penggembala dan petani kecil ditandai dengan transaksi uang serta barter

tradisional. Sebuah program penghematan yang sangat ketat diberlakukan oleh pemerintah Somalia dengan Paris Club (Cosshudovsky, 2011).

Program penyesuaian struktural atau SAP, menjadikan Somalia tergantung pada impor biji-bijian dari luar negeri. Dari pertengahan 1970-an hingga pertengahan 1980-an, bantuan pangan meningkat lima belas kali lipat, pada tingkat 31 persen per tahun. Ditambah dengan peningkatan impor komersial, termasuk surplus gandum dan beras murah yang dijual di pasar domestik menyebabkan kerugian dari produsen lokal, serta perubahan besar dalam pola konsumsi pangan yang merugikan petani tanaman tradisional (jagung dan sorgum) (Casement, 2013).

Devaluasi mata uang Somalia, yang diberlakukan oleh IMF pada bulan Juni 1981, diikuti oleh devaluasi periodik, yang mengarah ke kenaikan dalam harga bahan bakar, pupuk dan kebutuhan pertanian. Dampak pada produsen pertanian adalah langsung terutama di bidang pertanian tadah hujan, serta di bidang pertanian irigasi. Daya beli perkotaan menurun secara dramatis, perpanjangan program pemerintah yang dibatasi, infrastruktur runtuh, deregulasi pasar gandum dan masuknya "bantuan pangan" menyebabkan pemiskinan masyarakat petani.

Kemudian selama periode ini privatisasi berkembang pesat dimana banyak lahan pertanian yang unggul dikuasai oleh para birokrat, perwira militer dan juga pedagang yang memiliki koneksi di pemerintahan. Pemilik lahan kemudian lebih memilih menanam tanaman komoditi ekspor, karena mereka menganggap hal ini memiliki nilai lebih dibandingkan menanam tanaman untuk produksi pangan serta pasar domestik. Kekeringan menjadi hal buruk bagi petani Somalia namun hal yang lebih buruk yaitu privatisasi sumber-sumber air oleh pedagang lokal dan petani kaya, yang memperparah kemiskinan di Somalia (Khalek, 2011).

Privatisasi kesehatan hewan dikombinasikan dengan tidak adanya pakan ternak darurat selama periode kekeringan, komersialisasi air dan mengabaikan sumber air serta daerah konservasi, akibatnya grombolan ternak banyak yang mati dan begitu pula penggembala yang mengalami kerugian besar, padahal para penggembala nomaden tersebut adalah yang mewakili 50 persen dari penduduk negara itu.

Akibat lain dari privatisasi dokter hewan di Somalia menjadikan sector ekspor Somalia mengalami masalah, dan dengan adanya Tidak hanya itu dengan Free Trade

yang di berlakukannya IMF dan World Bank, masuknya daging sapi bersubsidi dan produk susu impor dari Uni Eropa telah menyebabkan kematian ekonomi lokal (Khalek, 2011).

Program IMF dan Bank Dunia telah menyebabkan perekonomian Somalia kedalam lingkaran setan, berkurangnya hewan ternak mendorong penggembala nomaden menjadi mati kelaparan yang pada gilirannya berimbas pada produsen gabah yang kesulitan untuk menjual, sehingga hanya ada pilihan dijual atau ditukar gandum untuk makan ternak mereka. Struktur sosial serta perekonomian tradisional hancur. Jatuhnya pendapatan devisa dari menurunnya ekspor sapi dan pengiriman uang (dari pekerja Somalia di negara-negara Teluk) berimbas pada neraca pembayaran dan keuangan publik negara yang mengarah kekerusakan program ekonomi dan sosial pemerintah.

Kemiskinan merupakan persoalan klasik yang sudah ada sejak manusia ada, kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang akan menjadi persoalan dari masa ke masa. Kemiskinan makin kompleks semenjak adanya globalisasi, globalisasi dengan segala macam agennya seperti IMF-World Bank dan system pendanaan dengan segala macam bentuk syaratnya makin menjerat negara-negara miskin sehingga sulit bangkit, akibat ketergantungan.

Akibat ketergantungan muncul apa yang disebut kemiskinan structural menurut Andre Gunder Frank, kemiskinan terjadi bukan karena persoalan budaya dan pembangunan ekonomi, melainkan politik-ekonomi Dunia (Anggraini, 2015).

Situasi dan konteks berbeda-beda dari waktu ke waktu di tiap-tiap negara berujung pada bentuk kebijakan kemiskinan yang berbeda-beda pula. Perubahan dari bentuk residual ke institusional, dari *state-centered policy* ke *global policy* adalah beberapa perkembangan yang terjadi dalam sejarah kebijakan untuk kemiskinan. Ketidaksiapan negara-negara mendorong banyak negara miskin masuk kedalam fase negara gagal atau failed state karena ketidakmampuan menghadapi tuntutan globalisasi.

Negara dikatakan gagal jika terdapat beberapa indikator sebagai berikut, antara lain negara tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduknya, keamanan tidak bisa dijalankan oleh negara, ekonomi mengalami de-industrialisasi, kualitas pelayanan public sangat buruk, tingkat korupsi sangat tinggi, inflasi tinggi, dan negara menjadi arena pertarungan kelompok atau fraksi yang berkuasa.

Definisi negara gagal (*failed states*), menurut Noam Chomsky (2006) dalam *Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy*, setidaknya ada dua karakter utama atau dua kategori yang membuat negara tertentu dapat disebut sebagai negara gagal. Pertama, negara yang tidak memiliki kemauan atau kemampuan melindungi warga negara dari berbagai bentuk kekerasan, dan bahkan kehancuran. Negara tersebut tidak dapat menjamin hak-hak warga negaranya, baik di tanah air sendiri maupun di luar negeri, dan tidak pula mampu menegakkan serta mempertahankan berfungsinya institusi-institusi demokrasi (Silaen, 1999)

Restrukturisasi pengeluaran pemerintah di bawah pengawasan lembaga Bretton Woods juga memainkan peran penting dalam hancurnya sistem pertanian di Somalia. Pemerintah Somalia dicegah oleh IMF dari memobilisasi sumber daya domestik. Rancangan target ketat untuk mengatasi defisit anggaran sudah ditetapkan sedemikian rupa. Selain itu, donor atau bantuan semakin tersedia "bantuan", bukan dalam bentuk impor modal dan peralatan, tetapi dalam bentuk "bantuan pangan". Hal ini dianggap percuma dalam mengatasi permasalahan kemiskinan bantuan yang seharusnya dibutuhkan malah tidak tersedia, yang tersedia adalah bantuan pangan diberikan berlebihan dan penyebarannya yang tidak merata.

Kelaparan dan masalah kesehatan merupakan salah satu dari banyak akibat kemiskinan di suatu wilayah atau negara, salah satu faktor utama penyebab kelaparan adalah tingkat ekonomi yang masih rendah. Suatu daerah dapat dikatakan miskin ketika komponen masyarakat di dalamnya tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, dan papan. Lalu tidak bisa mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang baik. Rendahnya kemampuan sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya alam yang ada, sehingga dieksploitasi oleh negara lain dan rendahnya lapangan pekerjaan dan kehidupan masyarakat hanya bergantung pada sumber daya yang terletak di lingkungan sekitar sehingga menimbulkan konflik atau pun perang saudara.

Di Somalia sendiri secara umum penyebab utama kelaparan adalah sistem ekonomi yang merugikan, kemiskinan, penyaluran bantuan yang tidak merata, faktor lingkungan seperti kekeringan dan perubahan iklim, konflik, dan pertumbuhan penduduk. Kemiskinan itu sendiri merupakan penyebab utama kelaparan. Semua sangat penting sebagai penyebab kemiskinan dan kelaparan di Afrika Sub-Sahara.

Di era globalisasi ini kemiskinan dan kelaparan sedikit banyak dipengaruhi oleh operasi system ekonomi politik global dimana kesenjangan makin kentara, kekuatan ekonomi politik berakhir ditangan minoritas, yang dapat hidup dengan baik sedangkan kelas bawah hidup dengan tekanan. Dan dengan adanya paraturan – peraturan yang telah disepakati oleh pemerintah dengan organisasi penyedia dana, mengakibatkan pemerintah menjadi tidak leluasa mengatur negaranya dimana banyak intervensi dalam setiap pembuatan kebijakan.

Implikasi Politik Bantuan IMF dan World Bank

Munculnya Aksi Perompak Somalia

Munculnya perompakan di Somalia sebagai akibat dari tidak adanya pemerintah yang efektif di Somalia pasca jatuhnya rezim Siad Barre, serta kemiskinan, yang mendorong penduduknya untuk menjadi perompak sebagai jalan untuk mendapatkan pendapatan.

Terdapat tiga fase dalam perkembangan munculnya perompak Somalia. Fase pertama dimulai dengan runtuhnya rezim Siad Barre pada tahun 1991, semenjak kejadian tersebut terjadi kekosongan kekuasaan di Somalia mengakibatkan negara tidak mampu menegakkan hukum. Akibatnya banyak konflik sipil bermunculan untuk memperebutkan kekuasaan saat itu (Irfan, 2014).

Konflik sipil yang terjadi selama bertahun-tahun kemudian menghancurkan sistem administrasi negara secara keseluruhan dan menyebabkan Somali pecah menjadi beberapa negara bagian baru. Pada tahun 1991, wilayah yang dahulu bernama British Somaliland Protectorate mendeklarasikan dirinya menjadi wilayah yang merdeka semi otonom yang kini dikenal dengan nama Somaliland. Kemudian, kelompok lain di wilayah bagian timur laut Somalia pun ikut mendeklarasikan diri menjadi sebuah wilayah yang merdeka yang bernama Puntland. Adapapun wilayah tengah dan selatan dari Somalia mengalami konflik senjata antar klan dan pengikutnya (Hartati, 2011).

Situasi ini menyebabkan sulitnya untuk membangun sebuah pemerintahan administratif yang efektif di negara Somalia. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap kurangnya kontrol negara dalam pengawasan keamanan di wilayah perairan Somali yang akhirnya menjadi salah satu penyebab banyaknya kapal asing penangkap ikan yang beroperasi di wilayah perairan Somalia. Seperti diketahui,

wilayah perairan Somalia terkenal memiliki komoditi laut yang yang berharga seperti lobster, tuna, dan ikan hiu.

Antara tahun 1991 – 1999 banyak kapal – kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal, yang akhirnya banyak menguasai wilayah perairan di Somalia. Aktifitas illegal yang dilakukan oleh kapal – kapal asing ini pun akhirnya berdampak buruk bagi perekonomian penduduk di wilayah tepi pantai Somalia yang sebagian besar adalah nelayan.

Selain melakukan penangkapan ikan secara illegal kapal – kapal asing ini pun membuang limbah beracun kelaut Somalia yang terbukti setelah bencana tsunami tahun 2004 yang menyapu container serta ribuan tong – tong berisi limbah, murah nya biaya yang di keluarkan negara – negara eropa untuk membuang limbah tersebut di Somalia menjadi alasan utama. Hanya diperlukan \$2.5 per ton untuk membuang limbah di perairan Somalia dibanding untuk membuang secara aman di wilayah eropa yang membutuhkan dana \$250 pertonnya. pembuangan limbah illegal tersebut menyebabkan rusaknya biota laut dan berdampak buruk bagi perekonomian di wilayah pesisir Somalia(Pirates hijack tsunami aid ship, 2005).

Beberapa nelayanpun kemudian beraksi menjadi pengaman pantai, namun aksi ini berkembang menjadi aksi perompakan dengan mulai menyergap dan menyerang kapal penangkap ikan asing serta menahan para kru kapal.Kasus pertama pembajakan yaitu pembajakan akapal Bonsella oleh 26 pembajak Somalia ketika sedang transit diwilayah Somalia tahun 1994. Saat itu perompak somlia mengaku sebagai “*Somalia Coast Guard*” dan menguasai kapal Bonsella selama lima hari. Setelah itu kapal dibebaskan setelah semua isi dicuri(Pirates hijack tsunami aid ship, 2005).

Fase kedua ditandai dengan makin berkembangnya aksi perompakan di Teluk Aden, yang mulanya aksi perompak hanya kumpulan nelayan menjadi kelompok perompak yang terorganisir, adanya peluang untuk mendapatkan penghasilan menyebabkan makin berkembangnya aksi perompakan di Somalia(Irfan, 2014).Kondisi kemiskinan menjadi penyebabnya.Lokasi perairan Somalia yang strategis juga menarik para perompak untuk melakukan aksinya.Wilayah sekitar perairan Somalia menjadi jalur perdagangan internasional sehingga banyak kapal – kapal dangang serta kapal pengangkut minyak yang melewati perairan Somalia dan teluk Aden.

Fase ketiga berkembangnya perompak Somalia pun dimulai ketika aksi perompak Somalia mulai menjadi sorotan negara -negara di dunia.Hal ini disebabkan ketika

pada 25 September 2008, perompak Somalia berhasil membajak dan menahan kapal MV Faina beserta para kru kapal. MV Faina yang berlayar menuju Mombasa mengangkut perlengkapan militer. Aksi perompak Somalia yang berhasil menawan MV Faina pun selanjutnya menyebabkan perompak Somalia mendapat perhatian reaksi dari negara - negara di dunia. Hal ini disebabkan kekhawatiran akan jatuhnya senjata militer tersebut ke tangan militan Islam Al Shabaab yang merupakan salah satu gerakan teroris di Somalia. Namun setelah lima bulan ditawan oleh perompak, kapal MV Fiana beserta kru kapal pun akhirnya dibebaskan setelah pemilik kapal membayar uang tebusan sebesar \$3,2 juta (Irfan, 2014).

Besarnya penghasilan dari hasil uang tebusan dan penjarahan menjadikan aksi perompak meningkat pada tahun 2008 (Live Piracy & Armed Robbery Report 2008, 2008). Uang tebusan kemudian digunakan untuk membeli barang mewah dan senjata kapal, serta perlengkapan lainnya untuk melakukan aksi perompakan. Yang kemudian menaikkan tingkat keberhasilan dalam aksi pembajakan. Hasil yang menjajikan dari aksi perompakan menjadikan hal ini sebagai lahan bisnis, yang berkembang pesat di Somalia terutama daerah Puntland dekat teluk Aden.

Kelompok perompak Somalia juga dihubungkan dengan jaringan kelompok Islam radikal Al- Shabaab yang merupakan gerakan teroris Somalia. Perompak Somalia dan jaringan Islam radikal Al-Shabaab terlibat dalam perdagangan manusia dan penyelundupan senjata. Selain itu ada indikasi uang tebusan hasil perompakan, digunakan Al-Shabaab untuk mendanai aksi – aksi mereka.

Berdasarkan data dari International Maritime Bureau (IMB) pada tahun 2008 terdapat 4 grup utama perompak Somalia yang beraksi di wilayah Teluk Aden, yang merupakan jalur utama yang harus dilewati oleh kapal-kapal dagang yang ingin ke Laut Mediterania melalui Terusan Suez. Kelompok tersebut dilengkapi dengan roket peluncur granat dan menggunakan perahu berecepatan tinggi. Empat kelompok perompak Somalia yang beroperasi di wilayah Teluk Aden yakni (Live Piracy & Armed Robbery Report 2008, 2008).

1. The National Volunteer Coast Guard (NVCG) yang dikomandani oleh Garaad Mohamed, yang ahli dalam merompak kapal - kapal kecil dan kapal penangkap ikan di sekitar wilayah pantai selatan Kismayo.
2. The Marka Group, yang dikomandani oleh Mohamed Siad (yang dikenal juga dengan nama Yusuf Indha'adde) yang terdiri dari beberapa kelompok yang tersebar di sekitar wilayah Marka.

3. The Puntland Group, yang terdiri dari kelompok nelayan tradisional yang beroperasi di wilayah Puntland.
4. The Somali Marine, yang terkenal sebagai kelompok yang paling kuat dan modern. Kelompok ini dikomandani oleh panglima perang Abdi Mohamed Afweyne. The Somali Marines Group memiliki struktur militer, yang terdiri dari laksmana armada, laksmana, wakil laksmana dan kepala operasi keuangan.

Aksi perompak Somalia di Teluk Aden mengakibatkan kerugian pada tingkat yang beragam. Bagi para pengusaha yang kapalnya melewati Teluk Aden, kini mereka harus membayar biaya asuransi yang lebih tinggi akibat aksi bajak laut yang makin meningkat. Bagi Somalia sendiri aksi perompakan memiliki dampak, salah satunya kesulitan dalam mendapatkan investor asing untuk mengembangkan infrastruktur di wilayah Somalia. Karena dianggap sebagai wilayah yang berbahaya. Kemudian dampak lain adalah berkurangnya pemasukan bagi penduduk Somalia di wilayah pesisir sekitar pelabuhan.

Munculnya Perang Sipil di Somalia

Perang sipil di Somalia diawali dengan berbagai kebijakan SAP yang mengakibatkan keadaan dimana sistem ekonomi yang diskriminatif, yang kian memperparah kemiskinan dan kondisi krisis yang berkepanjangan, konflik sipil muncul sebagai akibat dari perlawanan kaum minoritas atas ketidakadilan yang terjadi. Yang kemudian memunculkan kelompok ICU atau *Islamic Court Union*. ICU didirikan tahun 2003 oleh Syaikh Syarif Akhmed yang tujuannya untuk menghentikan krisis yang berkepanjangan di Somalia, ICU bergerak berlandaskan syariat Islam dimana mereka ingin menjadikan Somalia sebagai negara Islam. Kiprah ICU cukup besar, mereka banyak menyelesaikan masalah dengan menggunakan koridor syariah.

Dalam waktu singkat ICU mampu menarik simpati warga, tahun 2006 sebagian besar wilayah Somalia dengan basis di Mogadishu menerapkan syariat Islam. Eksistensi ICU didukung keadaan politik dan militer negara Somalia yang sangat lemah serta tidak adanya sentralisasi kekuatan pemerintah dan hukum di Somalia. Kehadiran ICU menimbulkan kekhawatiran negara – negara tetangga yang non-muslim seperti Ethiopia, Kenya dan juga pihak barat AS (History Somalia). Mereka tidak ingin pengaruh Islam makin menyebar luas di benua Afrika, yang dipandang bisa menimbulkan kelompok – kelompok garis keras.

Gerakan Islam yang semakin luas menyebabkan semakin terbukanya konflik antara ICU dengan *Transitional Federal Government* atau TFG serta ikut campurnya Ethiopia serta Amerika Serikat yang mendukung TFG. ICU pun menjadi tandingan bagi TFG atau Pemerintah Federal Transisi yang dipimpin oleh Presiden Abdullahi Yusuf. TFG adalah bentuk usaha untuk mengembalikan pemerintahan yang berfungsi setelah runtuhnya rezim Barre tahun 1991, TFG dibentuk pada akhir 2004 di Kenya. Konflik yang terjadi di Somalia lebih disebabkan oleh campur tangan pemerintah Ethiopia dan AS yang tidak setuju bahwa Islam berkembang pesat di negara tersebut. ICU kecewa dengan sikap pemerintahan Abdullahi karena kebijakan pemerintah yang diambil dinilai mendapat intervensi yang cukup banyak oleh negara lain. Perbedaan pandangan inilah yang memicu konflik antara ICU dan TFG.

Pertentangan yang dilakukan oleh ICU menyebabkan terjadinya konflik bersenjata dengan TFG dan konflik ini akhirnya terjadi di Mogadishu. Konflik yang terjadi antara TFG dan ICU pada bulan Februari 2006 telah menimbulkan banyak korban jiwa berjatuhan, sekitar 70 orang meninggal dunia serta ratusan orang lainnya luka – luka (Perang di Mogadishu Meluas ratusan Orang Tewas, 2007). Dominasi kelompok Islam pun semakin menguat, TFG tidak berdaya menghadapi kelompok Islam yang makin meluas. Pertempuran kembali pada bulan Juni 2006 dimana sekitar 500 warga sipil meninggal dunia (Perang di Mogadishu Meluas ratusan Orang Tewas, 2007). Konflik makin memanas ketika ICU berhasil menguasai sebagian besar kota Mogadishu serta wilayah sekitarnya. Pada kurun waktu satu tahun dari 2006 hingga 2007 sedikitnya 14.000 korban jiwa melayang. 19.270 orang lainnya terluka dan sekita satu setengah juta jiwa rakyat Somalia hidup terlunta – lunta di belantara hutan – hutan dan pengungsian yang tidak menentu (Konflik Somalia 2007, 2007).

Dalam konflik ini hal menariknya adalah peran pemerintah, terutama presiden Abdullahi selaku pemegang kekuasaan tertinggi di sebuah negara. Abdullahi Yusuf presiden TFG yang menentang adanya peran ICU (yang lebih dahulu terbentuk) hanya karena alasan factor latar belakang ICU yang Islamis. Keberatan Abdullahi kemudian didukung oleh intervensi dari Ethiopia dan terutama Amerika Serikat yang memandang islam sebelah mata. Intervensi ini kemudian menjadi masalah berkepanjangan ketika Abdullahi berasumsi bahwa pembangkangan yang ICU lakukan menjadi sebuah indikasi bahwa ada kemungkinan ICU terlibat dalam jaringan Al Qaeda (Krisis Somalia). Hal ini karena dalam kubu ICU ada kelompok ekstrimis yaitu Al Shabab yang diduga mempunyai hubungan dengan Al Qaeda. Kelompok ini

dikatakan beberapa anggotanya bergabung dengan Al Qaeda, yang bertanggung jawab atas sejumlah kekerasan kemanusiaan, termasuk pembunuhan anggota TFG dan masyarakat sipil dan sebagainya(Sihombing, 2010).

Kecilnya peran pemerintah dan keadaan ekonomi yang buruk akibat system dan kebijakan ekonomi yang tidak sesuai menimbulkan berbagai masalah kompleks, mendorong aktifitas sosial kearah yang anarki dimana menghalalkan segala cara untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Keadaan sosial, ekonomi dan politik yang kacau mendorong sebuah negara menjadi negara gagal, kondisi tercipta akibat dorongan globalisasi yang menuntut suatu negara untuk dapat berkembang, namun kendala ketidaksiapan dan desakan serta intervensi dari luar yang mengakibatkan kemunduran suatu negara seperti Somalia.

PENUTUP

Program IMF dan Bank Dunia telah menyebabkan perekonomian Somalia ke dalam lingkaran setan, berkurangnya hewan ternak mendorong penggembala nomaden menjadi mati kelaparan yang pada gilirannya berimbas pada produsengabah yang kesulitan untuk menjual, sehingga hanya ada pilihan dijual atau ditukar gandum untuk makan ternak mereka. Struktur sosial serta perekonomian tradisional hancur. Jatuhnya pendapatan devisa dari menurunnya ekspor sapi dan pengiriman uang (dari pekerja Somalia dinegara-negara Teluk) berimbas pada neraca pembayaran dan keuangan publik negara yang mengarah kekerusakan program ekonomi dan sosial pemerintah.

Petani kecil kehilangan tempat akibat pembuangan gandum bersubsidi dari AS di pasar domestik yang dikombinasikan dengan kenaikan harga input pertanian. Pemiskinan penduduk perkotaan juga menyebabkan pengurangan daya beli atau konsumsi makanan. Pada gilirannya, dukungan negara di sector pertanian berhenti dan produksi di peternakan negara menurun. Yang kemudian direncanakan akan ditutup atau diprivatisasi di bawah pengawasan Bank Dunia.

REFERENSI

- Anggraini, D. (2015). Retrieved from kompasiana.com:
http://www.kompasiana.com/dianaggraini/teori_struktural.html
- Casement, R. (2013). Retrieved from
<http://www.thomhartmann.com/forum/2013/10/somalia-not-failed-state-it-was-destroyed-imf-structural-adjustment>
- Cosshudovsky, M. (2011). *Global Research*. Retrieved from
<http://www.globalresearch.ca/somalia-the-real-causes-of-famine/25725>
- hartati, A. Y. (2011). *Konflik Internal Somalia Dalam Konteks Perang Sipil*. Retrieved March 27, 2016, from publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/.../view/47
- History Somalia*. (n.d.). Retrieved February 18, 2016, from
<http://www.nationsencyclopedia.com/Afrika/ml HISTORY.ht Somalia>
- Irfan, M. (2014). Retrieved March 26, 2016, from Repositori Unhas:
<http://repository.unhas.ac.id:4001/digilib/files/disk1/246/--muhammadir-12258-1-14-muham-n.pdf>
- Khalek, R. (2011). *Alternet*. Retrieved from
http://www.alternet.org/story/152335/food_emergency%3A_how_the_world_bank_and_imf_have_made_african_famine_inevitable
- Konflik Somalia 2007*. (2007). Retrieved March 25, 2016, from Era Muslim:
<http://eramuslim.com/konflikSomalia2007.html>
- Krisis Somalia*. (n.d.). Retrieved March 25, 2016, from
http://www.academia.edu/3988961/Krisis_Somalia
- Live Piracy & Armed Robbery Report 2008*. (2008). Retrieved March 22, 2016, from ICC-Commercial Crime Services: <https://icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/live-piracy-report>
- Perang di Mogadishu Meluas ratusan Orang Tewas*. (2007). Retrieved February 18, 2016, from Antara News: <http://www.antara.co.id/arc/2007/4/22/perang-dimogadishu-meluas-ratusan-orang-tewas/>
- Pirates hijack tsunami aid ship*. (2005, June 30). Retrieved March 24, 2016, from BBC News: <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4636695.stm>
- Poverties*. (n.d.). Retrieved 2015, from <http://www.poverties.org/famine-in-somalia.html>
- Sihombing, D. L. (2010). *Perang Sipil Somalia*. Retrieved March 24, 2016, from https://dennylorenta.wordpress.com/2010/06/06/perang-sipil-somalia-konflik-internal-dalam-konteks-politik-global-kontemporer/#_ftn5

Silaen, V. (1999). *Negara Gagal*. Retrieved from reformata.com:
<http://reformata.com/news/view/786/negara-gagal>